

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masing-masing negara mempunyai sistem politik kategoris, termasuk negara Indonesia, desain politik negara adalah sebuah pusat yang merupakan urat nadi teruntuk kesinambungan berbangsa serta bernegara yang aman dan damai. Inti dari berfungsinya desain politik yang aman dan damai adalah hajat tak terbatas bagi bangsa untuk membersihkan “saluran darah” bagi pertumbuhan dan perkembangan dari pelbagai unsur tujuan nasional. Unsur-unsur yang terdapat dalam aspek tujuan nasional antara lain, meliputi unsur pemikiran, strategi, perniagaan, kebiasaan, undang-undang, pertahanan, serta keamanan negara.

Perkembangan unsur yang telah disebutkan, bertujuan memberikan kualitas lebih teruntuk kontribusi desain politik terhadap pengisian, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur politik, juga merupakan pembatasan serta kondisi tercapainya tujuan nasional yang telah diatur saat Alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV.

Perpolitikan yang baik ditunjang oleh kemampuan manusia yang berkeyakinan, berbobot, terpercaya, serta berakhlak terpuji. Bersama, pembangunan tercipta dengan efektif dan kemakmuran berkehidupan masyarakat akan naik sesuai dengan harapan dari umum. Menurut Carlton Clymer dalam buku Sahya Anggara, politik dalam pengertiannya didasarkan pada Bahasa Yunani, yaitu Polis yang mengartikan negara. Yunani Kuno pada saat itu, masyarakat berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan kemakmuran dalam kelangsungan hidup. Disaat orang berusaha untuk memastikan tempat mereka di dalam masyarakat, mendapatkan kebahagiaan diri dari bahan yang tersedia, ataupun mempengaruhi masyarakat untuk menerima pandangan atau bisa dibilang sebagai hasutan, maka mereka

terlibat apa yang disebut politik¹. Empat asumsi ketika berbicara tentang politik. Keempat asumsi ini dianggap sama dalam konteks situasi di mana kata “politik” disebutkan, meskipun dipelajari secara berlainan. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut².

1. Politik selaku keterampilan penguasa, politik sebagaimana pelaksana kontrol melalui masyarakat dari adopsi serta memantapkan vonis bersama. Pendapat tersebut telah muncul dan telah berkembang pada zaman Yunani Kuno.
2. Politik dipergunakan sebagai hubungan politik, dalam buku *Politics* Aristoteles berpendapat manusia adalah hewan politik. Artinya, masyarakat akan mendapatkan kemakmuran jika menjalani kehidupan yang baik melalui sebuah komunitas. Selanjutnya, perbedaan dibuat antar bidang “publik serta “pribadi”. Dua bidang ini telah diperluas ke negara dan masyarakat sipil. Di dalam “negara” ada sebuah lembaga berlaku semacam pengadilan, pejabat pemerintah, polisi, tentara, sistem kekayaan, dan sejenisnya. Sedangkan di dalam “masyarakat sipil” ada sebuah lembaga seperti keluarga, teman, perusahaan, komunitas pekerja, dan sejenisnya. Masalah timbul, setiap badan atau masyarakat sipil condong akan mengutamakan kepentingan pribadi. maka muncul konsep “negara” bertujuan mengatur lembaga sipil tersebut. Dalam hal ini negara dan masyarakat sipil adalah sebuah hubungan dan menjadi hipotesis.
3. Politik sebagai jalan tengah, pembagian kekuasaan adalah pendapat yang dipergunakan untuk jalan tengah. Dalam politik yang kita kenal, tidak ada partai yang memang tidak mempunyai kepentingan. Pelbagai pihak berusaha untuk memajukan permintaan untuk mencapai kesepakatan antara satu sama lain. Kebijakan suatu negara dianggap baik ketika “masalah” dapat diselesaikan dengan jalan tengah atau mufakat di meja makan, tanpa adanya pertumpahan darah.

¹ Sahya Anggara, “PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA” (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 2-3.

² Andrew Heywood, *POLITICS*, 2nd ed. (New York: Palgrave MacMillan, 2002), hlm. 7-12.

4. Politik dipergunakan untuk kekuasaan. Kekuasaan adalah skill seseorang atau kelompok yang bertujuan mempengaruhi individu atau kelompok lain pada tuntutan permintaannya. Politik adalah sebuah hubungan atau perantara pemerintah dengan rakyatnya pada konteks pembuatan kebijakan yang berkaitan tentang kebaikan di suatu daerah.

Ramlan Surbakti berbicara tentang konsep politik, diantaranya lima pendapat atau pandangan tentang politik yang mengartikan bahwa politik adalah keinginan yang harus ditempuh warga negara untuk menjelaskan atau menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, politik adalah suatu hal yang berhubungan dengan aktivitas pemerintah. Selanjutnya, politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengarahkan serta mempertahankan kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya, politik ditunjukkan sebagai aktivitas perumusan atau pelaksana peraturan umum. Selanjutnya, politik sebagai akar masalah untuk mencari dan melindungi sumber yang telah dianggap konsekuensial. Hal signifikan dalam politik adalah hubungan antar penguasa yang memerintah dan masyarakat di dalamnya. Politik juga menyimpan beberapa unsur yang diperlukan penjelasan selanjutnya, yaitu interaksi antar pemerintahan, metode penciptaan, serta sebagai pelaksana pada ketentuan yang memang mengikat, kesejahteraan, dan daerah tertentu³.

Partai politik mulai berasal pada pendapat bahwa dengan terbentuknya partai politik, kaum politik bisa mempersatukan masyarakat dengan pikiran yang sama, sehingga pemikiran serta penjelasan para kaum ini bisa diintegrasikan. Mengenai akibat dari sebab tersebut hal ini berdampak pada pembuatan dan pelaksana keputusan. Selaku universal bisa dikatakan bahwa partai politik adalah suatu wadah yang mempunyai anggota, kelompok yang berpola, nilai, serta cita-cita sama. Partai politik bertujuan untuk mencapai kekuasaan politik dengan cara

³ Ramlan Surbakti, *MEMAHAMI ILMU POLITIK* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 1-11.

yang sah. Melihat dari fungsinya, partai politik digunakan sebagai alat komunikasi atau perantara untuk memberikan pendapat ke dalam bentuk yang telah diatur. Fungsi selanjutnya adalah, sebagai tempat sosialisasi politik, dan sarana pengatur konflik⁴.

Fakta berdirinya partai politik Islam pasca orde baru, ditentukan oleh pelbagai faktor. Faktor teologis menjadi yang pertama, dikarenakan agama mewujudkan hal yang tidak bisa dipisahkan oleh politik, termasuk di dalamnya adalah masalah kenegaraan tidak bisa dipisahkan oleh persoalan agama. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial, di Indonesia sendiri mayoritas memeluk agama Islam. Faktor Reformasi, faktor ini diawali mahasiswa yang dimana menggulingkan rezim orde baru. Faktor sejarah, dalam sejarah Indonesia, masyarakat muslim adalah kekuatan atau ujung tombak dalam peran melawan penjajah. Dengan demikian partai politik Islam muncul dari terlahirnya beberapa faktor yang telah dijelaskan⁵. Tujuan dibentuknya partai politik Islam adalah partai islam juga harus duduk dalam elite kekuasaan serta nilai Islam bisa diaplikasikan pada pengaruh kebijakan yang diproses oleh parlemen yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat muslim⁶. Tentu saja, contoh keterlibatan Islam yang paling nyata dalam politik Indonesia dapat dilihat di Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini berubah menjadi partai politik dari tahun 1952, pada tahun 1973 Partai Persatuan Pembangunan dibangun sebagai wadah untuk menampung partai-partai Islam, dan tetap menjadi elemen partai yang paling vokal sampai tahun 1984⁷.

Kategorisasi partai Islam terjadi pada tahun 1973. Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, serta Persatuan Tarbiyah Islamiyah berasosiasi membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Lebih lanjut pemilihan umum pada tahun 1977

⁴ Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 397-422.

⁵ Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 1, no. 1 (2004): 29-48.

⁶ Ishomuddin, "PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA," *Jurnal Humanity* 8, no. 2 (2013): 21-29.

⁷ Martin van Bruinessen, *RAKYAT KECIL, ISLAM, DAN POLITIK*, Penerbit Gading (Yogyakarta: Gading, 2013), hlm. 136.

berlangsung dengan organisasi politik seperti, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Pada tahun 1973 organisasi peserta pemilu seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, berhadapan dengan berbagai rintangan, kendala berada pada ketertarikan dukungan dari para pemilih, yang disebabkan oleh kesetiaan tunggal. Kecuali partai Golongan Karya yang terus menerus atau bisa dipastikan mendapatkan suara dalam pemilu. Hikmah dari pemilu tersebut adalah memberikan pendidikan politik ke depannya bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa menentukan suara dan menentukan pilihan secara sadar dan tanpa adanya ajakan yang tidak pasti⁸. Asal ideologi Partai Persatuan Pembangunan yaitu Islam Rasional. Unsur politik yang ada sangat difasilitasi oleh Partai tersebut, sehingga disebut dengan “Rumah Besar Umat Islam”. Pada zaman Orde Baru terkadang Partai Persatuan Pembangunan menjadi alat ucap atau perantara serta tak jarang mengambil sikap tegas untuk memperjuangkan nilai Islam. Partai Persatuan Pembangunan melayani serta berjuang untuk menciptakan serta menjadi pembina untuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, meningkatkan kesejahteraan berkehidupan agama, meningkatkan persaudaraan Islam⁹.

Pemilihan topik pada penelitian ini berdasarkan atas ketertarikan penulis untuk meneliti Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bogor, sebab Partai ini mempunyai peristiwa sejarah di dalamnya, serta dari aspek menyadarkan masyarakat sehingga tahu apa yang dinamakan politik, dan bertujuan menambah penelitian di bidang politik. Di samping itu juga penelitian ini didasarkan pada alasan tempat, Kabupaten Bogor sebagai tempat penelitian menurut penulis sangat berhubungan, karena Kabupaten Bogor adalah tempat tinggal sekaligus tempat kelahiran, kedua berhubungan adanya pandemi yang menghambat ruang dan waktu, dan ketiga terpilihnya Ade Munawaroh Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Dari segi waktu,

⁸ Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, hlm. 132.

⁹ Tri Joko Waluyo, “PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN IDEOLOGI ISLAM,” *Seminar Nasional 2* (2015): 17–18.

penulis mencantumkan waktu 1973, karena partai tersebut terbentuk, dan menetapkan tahun 2019, sebagai kepengurusan terakhir dari Partai tersebut. Maka dari itu peneliti ingin membahas Sejarah serta Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 1973-2019. Penelitian ini juga sebagai pemecah masalah, penelitian ini dilakukan secara objektif, sistematis, menggunakan metode atau prosedur, serta berpegang teguh pada prinsip pengolahan data, dan pembuktian secara ilmiah

B. Rumusan Masalah

Perumusan atau tinjauan masalah di dalam penelitian ini mengangkat dua masalah yang berhubungan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Bogor, antara lain;

1. Bagaimana kondisi perpolitikan nasional serta sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?
2. Bagaimana sejarah serta perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Bogor tahun 1973-2019?

C. Tujuan Penelitian

Hal umum dalam penelitian memiliki maksud untuk mendalami sesuatu dengan lebih mendalam, mendapatkan pandangan baru, tidak ada hasil praduga, serta menambahkan kekayaan dalam bidang ilmu pengetahuan¹⁰.

1. Mengetahui kondisi perpolitikan nasional serta sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Mengetahui bagaimana sejarah serta perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Bogor tahun 1973-2019.

D. Tinjauan Pustaka

¹⁰ Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian," *Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 5 (2012): 148–150.

Berbicara tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka adalah sebuah pencarian wacana ilmiah, jurnal, serta sumber lainnya yang menyangkut tentang permasalahan yang sama dengan apa yang diteliti. Tinjauan pustaka diproyeksikan atau memberikan gambaran umum tentang sumber apa saja yang sudah diperoleh saat melakukan penelitian yang sama, tujuannya adalah menjadi pembeda antara penelitian yang ingin diteliti dan yang sudah diteliti¹¹. Dalam membedakan kajian yang lain, diperlukan peninjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang bisa dijadikan pembanding dalam penelitian ini. Pembanding kajian ini adalah;

Pertama, Heri Subagja, (2021). “Perkembangan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Tasikmalaya 2001-2008”. Penulis menemukan skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, skripsi ini menjelaskan tentang asal mula partai yang dibentuk pada 5 Januari 1973, alhasil dari gabungan partai-partai Islam yang ada di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan juga tentang perkembangan dari bidang agama, politik, sosial, pendidikan, serta perekonomian. Kaderisasi di awal periode berjumlah 213 orang.

Yana Mulyana, (2020). Disertasi yang berjudul “Agama dan Politik: Studi Tentang Loyalitas Kader Nahdlatul Ulama di Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Barat”. Disertasi yang ditemukan penulis berasal dari sumber yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Disertasi ini menjelaskan tentang loyalitas antara paham kader Nahdlatul Ulama yang beranggotakan partai Persatuan Kebangkitan Bangsa serta Partai Persatuan Pembangunan. Kekuatan loyalitas ini berasal dari taatnya anggota pada para Kiai yang dijadikan sebagai motivasi untuk masuk ataupun bertahan dalam tubuh partai, akan tetapi ada pembeda diantaranya adalah ketaatan antara pemimpin daerah dan juga Kiai tersebut.

¹¹ Abdusy Syakur Amin Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, “Writing a Literature Review Research Paper: A Step-by Step Approach,” *International Journal of Basic and Applied Science* 03, no. 01 (2014): 47–56.

Chandra Firmansyah, (2017). “Rekrutmen Calon Kepala Daerah di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Jawa Barat” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menjelaskan tentang, prosedur atau tahapan apa saja yang bisa dikategorisasikan sebagai Calon Kepala Daerah, rekrutmen ini diawali dengan tahapan prosedur survei serta penelitian, uji layak, loyalitas, tahap menetapkan calon, nota kesepakatan, pakta integritas, dan tahapan suksesi Calon Kepala Daerah.

Keempat, Asep Ginanjar, Maulana F (2017). “Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Tesis ini menjelaskan tentang penarikan anggota partai yang berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat serta Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat. Pelaksanaan ini menjadi tiga tahap, yaitu sosialisasi, aspirasi, dan bakti sosial. Dijelaskan juga tentang faktor suksesi beserta faktor penghambat penarikan anggota.

Acep, Bagja Achmad N K (2013). “Pengaruh Kebijakan Pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja Kader di Kota Bandung: Studi Survei Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Jl. Pelajar Pejuang 45. Nomor 120 Kota Bandung”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh besar kepada tingkatan usaha kerja kader di Kota Bandung. Skripsi ini menjelaskan juga tentang pengaruh besar terhadap kebijakan pimpinan partai.

Heri Subagja, Fajriudin, Fathia Lestari (2021). “Sejarah dan Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tasikmalaya dan Partisipasinya dalam Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Jurnal ini menjelaskan tentang sejarah dari Partai, serta pemilu yang diadakan tahun 1999 dengan penyusunan strategi baru yang bertujuan untuk mendapatkan hasil suara besar di wilayah Tasikmalaya, jurnal yang terbit dari Histori Madani ini menjelaskan juga tentang

pemisahan Partai cabang Kota dan Kabupaten. Akan tetapi, pemisahan ini menjadi hal baru untuk memperjuangkan semangat PPP untuk mempertahankan eksistensinya.

Tian Fitriara Huda (2012). “Dinamika Partai Persatuan Pembangunan pada Era Orde Baru”. Skripsi ini menjelaskan apa perubahan inti dari Partai Persatuan Pembangunan untuk menghadapi Orde Baru. Partai Persatuan Pembangunan lahir sebagai kekuatan baru dengan asas Islam berprinsip Pancasila. Partai Persatuan Pembangunan sempat jatuh dalam awal kariernya di dunia perpolitikan, akan tetapi mampu bangkit karena ketangguhannya dan eksistensi dalam perpolitikan di Indonesia.

Ade Hikmatul Fauziah (2015). “Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Suksesi Kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014”. Skripsi ini penulis temukan Internet yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi menjelaskan tentang bagaimana perbandingan suara antara pemilu 2014 dan 2019. Pada tahun 2019 suara naik signifikan dibanding tahun 2014. Penyebab atau pelaku utama adalah bergabungnya Partai kepada koalisi Merah Putih. Akan tetapi setelah dilantiknya Jokowi- Jusuf Kalla maka sebagian anggota ada yang memilih mendukung pemerintah sah dan resmi.

Nurrfaidah (2016). “Konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Konflik Internal 2014”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan munculnya individualisme atau kelompok-kelompok yang tidak sepemikiran, yang dimana pemikiran itu berdampak pada pendapat yang tidak disuarakan. Penjelasan skripsi ini juga menjelaskan tentang bahayanya acuan konflik yang terjadi pada tubuh Partai Persatuan Pembangunan di Yogyakarta, dan hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak satu dan yang lainnya.

E. Metode Penelitian

Disiplin ilmu sejarah memiliki beberapa bagian alat yang bertujuan mengategorisasikannya secara menyeluruh yang dimana bertujuan untuk membangun

pemikiran, hal ini yang kita ketahui adalah metode sejarah. Jika metode berhubungan melalui masalah lalu bagaimanakah individual itu mendapatkan pengetahuan. Metodologi bersangkutan dengan hal apa yang harus diketahui. Secara tersirat metode memiliki bagian teoritis. Tahapan pertama, peneliti harus memastikan hendaknya apa yang akan dibahas melalui objek tersebut, atau sederhananya menentukan pendekatan yang akan diterapkan¹².

Metodologi dikenal dari bahasa Yunani yaitu “metodos”, “logos”. Kata melalui yang diartikan sebagai metha, dan cara dapat diartikan sebagai hodos. Dapat diartikan metode mempunyai arti penting untuk menentukan jalan atau cara apa yang dimuat untuk memperoleh keilmuan yang diartikan sebagai “logos”. Metode memberikan petunjuk dalam hubungannya memiliki peranan penting terhadap filsafat, lalu disederhanakan ke dalam cara praktis, yang sekarang disebut sebagai metodologi¹³. Metode menjelaskan bahwa cara apa, jalan apa, apa petunjuk pelaksanaan, dan apa petunjuk teknisnya. Metodologi berbicara tentang “science of method”, atau ilmu yang berbicara tentang jalan¹⁴. Metode penelitian ini dianggap penting bagi peneliti sejarah, karena peneliti sejarah bisa mengaplikasikan penelitian yang akan diteliti dengan kalimat sederhananya seperti jalan mana yang peneliti akan lewati atau aplikasikan ke dalam penelitian tersebut.

Ketika peneliti ingin melakukan penelitian tentang sejarah, peneliti harus dihadapkan dengan pengertian metode dalam penelitian sejarah. Penggunaan metode dan cara adalah pedoman disaat melakukan penelitian sejarah beserta permasalahannya, dengan demikian metode sejarah adalah hal penting untuk membangun peristiwa-peristiwa sebagai kisah. Metode sejarah digunakan atau bertujuan untuk mempertanyakan inti dari permasalahan atau dasar penulisan yaitu apa, kapan, dimana, siapa, kenapa, dan bagaimana¹⁵.

¹² Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 9.

¹³ Miftahudin, *Metodologi Sejarah Lokal* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 35.

¹⁴ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 100.

¹⁵ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 74-75.

Kaidah penulisan sejarah yang berhubungan dengan tempat, periode, suatu peristiwa, institusi atau individu, berdiri pada empat kiat pokok. Objek yang dikumpulkan berasal dari zamannya serta pengumpulan sumber cetak, tertulis, dan lisan asalkan penelitian itu sama. Membuang sumber yang tidak ada sangkut pautnya. Memberikan kesimpulan pada sumber original, serta menyusun saksi yang memang benar dapat dipercaya sehingga memiliki kisah atau sajian yang memiliki arti. Metode itu sangat diperlukan yang bertujuan agar peneliti tersebut tidak tertipu, dan metode sejarah merupakan suatu bagian analitis yang memiliki pandangan bahwa sumber yang dicari dan cara peneliti membangun sebuah cerita memiliki pengaruh¹⁶.

Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah sebuah alat untuk mengenalkan penelitian dan penulisan. Langkah disaat mengambil topik, mengambil sumber, kritik interen, dan eksteren, interpretasi atau penjelasan, dan sajian dalam bentuk tulisan. Hal ini diperlukan praktik penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterampilan¹⁷. Secara lebih ringkas, setiap langkah penelitian sejarah yang mengurutkan pada sebutan Heuristik, Kritik (interen dan eksteren), interpretasi, dan penulisan.

1. Heuristik

Menurut Sartono Kartodirjo, pengumpulan sumber atau heuristik adalah sebuah seni. Seni yang dimaksud adalah alat kerja yang membutuhkan kecekatan. Sumber yang tersedia akan tampak jika seorang peneliti menyukai kepada permasalahan yang sudah maupun belum terpecahkan. Kepentingan dalam mencari sumber terletak pada dokumen yang berkaitan¹⁸.

Pada tahap ini pengumpulan sumber bisa berbentuk lisan, tulisan atau benda yang berkaitan tentang peristiwa sejarah. Dalam sifatnya sumber terbagi dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber utama dalam kajian penelitian sejarah adalah sumber

¹⁶ Louis Gottschalk, "Mengerti Sejarah," in *Understanding History: A Primer of Hitorical Method*, ed. Nugroho Notosusanto, 2nd ed. (Jakarta: UI-Press, 1969), hlm. 24.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), hlm. 64.

¹⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 31.

yang langsung berkaitan yaitu sumber primer, dan sumber sekunder digunakan sebagai sumber pelengkap¹⁹. Menurut Dudung Abdurahman ada alat-alat pembantu yang bisa dikategorikan sebagai pengumpulan sumber. Menurut beliau, bahan penelitian sejarah bersumber atau bisa didapatkan di museum dan perpustakaan. Terkadang bahan atau sumber bisa dimiliki oleh pihak individu ataupun kelompok²⁰.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan sumber adalah peneliti hendaknya mencermati rekam jejak dengan mempertanyakan apa pada sumber sejarah. Menentukan bahan penelitian, diharuskan mempunyai pertimbangan dalam mengategorisasikan sumber primer dan sekunder. Pengelompokan sumber bisa dibedakan menurut bahan, asal, atau penyampai urut, dan apa tujuan sumber itu dibuat. Prinsip yang harus ditekankan dalam pengumpulan sumber adalah, peneliti diharuskan mengejar sumber utama atau sumber primer. Dalam penelitian sejarah, kita menganggap bahwa pelaku sejarah adalah saksi mata dan itu bisa menjadi sumber primer. Jika berbentuk dokumen, semisal arsip dan catatan rapat kerja.

Gottschalk berpendapat bahwa usaha dalam memilih suatu penelitian lalu peneliti melakukan pengumpulan informasi dan sumber bisa disebut dengan heuristik. Kegiatan sejarah tidak ada bedanya dengan aktivitas kepastakaan yang berhubungan dengan buku tercetak. Sumber atau bahan yang ingin dijadikan peneliti sebuah penelitian mempunyai sifat yaitu sifat arkeolog, epigrafi, dan numerik bisa didapatkan di museum. Jika bahan penelitian tersebut bersifat dokumen resmi, bisa didapatkan di perpustakaan dan kantor arsip pemerintah²¹.

Kajian pustaka memiliki tempat paling penting pada penelitian. Terkadang peneliti kerap kali membedakan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Tujuan utama tertuju pada fungsi, tujuan, serta kedudukan kajian pustaka pada penelitian. Anggapan dari orang banyak kajian pustaka adalah suatu aktivitas mempelajari serta membaca buku lalu

¹⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 90.

²⁰ Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 101.

²¹ Gottschalk, "Mengerti Sejarah," hlm. 42.

menarik sebuah kesimpulan. Ada beberapa kebenaran untuk klaim ini. Namun, dalam waktu yang lampau perpustakaan memang menjadi sebuah pusat ilmu pengetahuan, baik dalam buku, dokumen, manuskrip kuno, dan dokumen yang telah dicetak. Pelbagai jenis surat kabar, dokumen, serta bahan yang tidak dicetak disimpan di perpustakaan lalu dikumpulkan menggunakan klasifikasi lainnya. Koleksi tersebut diklasifikasikan menurut kelompok ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu²².

Adapun studi pustaka yang dilakukan penulis adalah melakukan pengumpulan bahan atau sumber berbentuk buku, jurnal artikel, naskah, koran, yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis ambil. Kegiatan pencarian serta pengumpulan sumber yang dilakukan penulis adalah mencari di website pemerintah Kabupaten Bogor, e-book, jurnal, skripsi, ataupun literatur lainnya yang menunjang penelitian yang penulis lakukan. Di zaman yang canggih ini banyak sekali website resmi yang menyediakan e-book secara gratis dan penulis memberikan ucapan terima kasih kepada website resmi tersebut. Penulis juga menggunakan sumber penelitian ini dengan adanya koleksi pribadi. Dalam tahap selanjutnya adalah dengan membagi atau menjeniskan yang mana bahan atau sumber utama, dan yang mana bahan atau sumber pendukung. Dalam pencarian sumber, penulis menjumpai topik penelitian yang relevan untuk membantu penyelesaian penelitian ini. Diantara sumber yang digunakan adalah;

a. Sumber Primer;

- 1) Arief Budiman. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang prinsip-prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi” Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018.
- 2) Arief Budiman. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.” *Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018.

²² Khatibah, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra*’ 05, no. 01 (2011): 36–39.

- 3) Afif. “Sejarah Singkat PPP. “Organisasi Sejarah, 5 Juli 2022.
<https://ppp.or.id/2021/12/06/sejarah-singkat-ppp/>
- 4) Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan,1951.
- 5) Komisi Pemilihan Umum. “Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2004.” Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor, 2004.
- 6) Komisi Pemilihan Umum. “Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2009.” Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor, 2009.
- 7) Komisi Pemilihan Umum. “Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2014.” Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor, 2014.
- 8) Komisi Pemilihan Umum. “Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2019.” Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor, 2019.
- 9) Partai Persatuan Pembangunan. “Anggaran Dasar Hasil Muktamar VII. “Jakarta Timur: Partai Persatuan Pembangunan, 2016.
- 10) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2001-2006
- 11) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2006-2011
- 12) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2011-2016

- 13) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2016-2021.
- 14) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2021-2026
- 15) Wawancara dengan Ade Hambali, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor.

b. Sumber Sekunder;

- 1) Abdul Mun'im Al-Hafni Muhtarom, Ensiklopedia: golongan, kelompok, aliran, mazhab, partai, dan gerakan Islam, penerbit Grafindo. Jakarta, 2006.
- 2) Tri Joko Waluyo, Partai Persatuan Pembangunan PPP dan Ideologi Islam, Seminar Nasional, Pekanbaru, 17-18 November 2015.
- 3) Kevin W. Fogg, Indonesia's Islamic Revolution, University Printing House, Cambridge, United Kingdom, 2020.
- 4) Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, penerbit Friederich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008.
- 5) Yunita Faela, Partai Politik & Pendidikan Agama Islam. Penerbit PPIM UIN Jakarta, Jakarta, 2020.
- 6) Deliar Noer, MENGAPA PARTAI ISLAM KALAH? Penerbit Alvabet. Jakarta, cetakan 1, Oktober 1999.
- 7) Ikrar, Partai-Partai Islam di Indonesia, Jurnal Al-Syrah, Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2003
- 8) Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1. No. 1, 2004

- 9) M. Amin Nurdin, Ali Thaufan, Dwi Saputra, dan Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- 10) Haris Syamsudin. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.

2. Kritik

Tahapan selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah tahapan komentar atau yang dikenal sebagai kritik, selepas penulis memahami topik yang sama serta pengumpulan data telah dilalui. Dalam tahapan kritik ini terbagi menjadi dua jenis, orisinalitas atau keautentikan sumber disebut kritik eksteren, dan integritas yang kita bisa sebut sebagai kritik interen²³.

Cobaan pada autentisitas, bertujuan untuk membagi dimana yang benar atau itu hanya tipuan belaka keaslian data, arsip atau dokumen. Peneliti diharuskan menguji sumber yang dipergunakan pada saat penyelidikan. Sejarawan harus memperhatikan tanggal pada dokumen, sejarawan juga harus meneliti tinta yang digunakan, melakukan penelitian terhadap tulisan tangan, materai, jenis huruf, tata bahasa, dan watermark²⁴.

Deskripsi di atas dilakukan oleh penulis sebagai penerapan untuk memastikan bahwa sumber yang didapat benar orisinal atau memang adanya pemalsuan, maka dari itu penulis melakukan beberapa pengujian terhadap sumber primer didasarkan pada kritik ekstren atau otentisitas.

- 1) Arief Budiman selaku Ketua dari Komisi Pemilihan Umum, dalam keputusan ini dibuat untuk menentukan anggota-anggota yang dimana pantas menjadi anggota legislatif tingkat pusat, provinsi, ataupun

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 77.

²⁴ Gottschalk, "Mengerti Sejarah," hlm. 98.

kabupaten. Dalam surat keputusan ini ada stempel dan juga tanda tangan dari Arief Budiman.

- 2) Sumber primer juga dengan orang yang sama yaitu Arief Budiman, dalam dokumen ini tercantum keputusan tentang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tahun 2018.
- 3) Sejarah Singkat PPP pada website PPP, website ini berstatus resmi dari Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri, dan penulis sangat yakin pada website resmi ini.
- 4) Kementerian Republik Penerangan RI, dokumen yang ditemukan penulis ini bentuknya masih bisa dibilang bagus karena terwat rapi, dan juga pada kertasnya sudah menguning.
- 5) Dokumen atau arsip KPU berisikan tentang perolehan suara pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, penulis berkunjung langsung ke kantor KPUD di Kabupaten Bogor, dan penulis cukup yakin pada sumber ini sebagai sumber yang kredibel dan otentik.
- 6) Penulis menemukan sumber Anggaran Dasar Hasil Muktamar dari website resmi Partai Persatuan Pembangunan, dalam dokumen ini masih terjaga utuh dan bukan hasil scan, dokumen ini juga terdapat stempel dan tanda tangan dari Ir. H. Aunur Rofiq selaku Ketua Pimpinan Pusat, dalam dokumen ini juga terdapat lampiran pada surat keputusan 07/TAP/MUKTAMAR/VIII/PPP/2016.
- 7) Surat Keputusan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor Masa Bakti 2006, 2011, 2016, 2021. Dokumen ini penulis dapatkan dari kunjungan penulis ke kantor Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Bogor. Surat keputusan ini

dibuat oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang ditujukan untuk Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Bogor. Surat Keputusan ini berbentuk dokumen elektronik, tercantum juga nomor Surat Keputusan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dalam Surat Keputusan ini juga tercantum stempel dan tanda tangan dari Rachmat Yasin, Ade Munawaroh Yasin, dan Elly Halimah Rachmat Yasin, selaku orang-orang yang menempati jabatan strategis.

- 8) Wawancara dengan Ade Hambali selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Wilayah Kabupaten Bogor. Ade Hambali adalah anggota serta memiliki jabatan sebagai Sekretaris dari Pimpinan Majelis Pakar Cabang pada masa bakti 2016-2021, dalam wawancara tersebut beliau menceritakan tentang masa-masa pembangunan partai pada tahun 1973, tokoh pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum, lalu seterusnya hingga periode sekarang. Penulis bisa mempertanggung jawabkan sumber, karena sumber lisan ini kredibel dan berhubungan langsung dengan PPP Kabupaten Bogor.

Kemudian setelah melakukan kritik interen pada data yang sudah dikumpulkan, data interen sendiri digunakan untuk mencari kekhususan daripada keterangan, sebab bukti kesejarahan diharuskan memiliki empat unsur subjek kesejarahan, antara lain adalah unsur kronologi, fungsi, biografi, serta geografi.

Kritikan internal yang dipergunakan oleh penulis menggunakan hipotesis interogasi, yang memang tidak berhubungan sampai semua bukti diperiksa. Langkah selanjutnya adalah penulis melakukan beberapa pertanyaan dan bisa mengumpulkan jawaban sehingga bisa membantu penulis dalam mengkritik sumber tersebut. Komentar yang penulis layangkan terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul berbentuk pertanyaan untuk menghasilkan fakta

sejarah, pada sumber-sumber yang terkumpul penulis melayangkan sebuah pertanyaan aspek biografis, geografis, kronologis, dan fungsional.

Dari hal ini penulis mempunyai alasan tersendiri, sumber yang sudah terkumpul sudah mempunyai jawaban yang relevan. Dari aspek biografis, sumber primer yang sudah penulis kumpulkan ditulis oleh orang berwenang seperti Ketua DPW PPP Jawa Barat, Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dinas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan lain sebagainya. Tentu saja ada pihak-pihak yang membantu dalam pembuatan buku ataupun arsip tersebut. Dari aspek geografis. Berbicara tempat, sumber primer yang sudah penulis kumpulkan didapatkan dari sumber-sumber terpercaya seperti Web Resmi Kedinasan di Kabupaten Bogor. Dari aspek kronologi, kronologis tepatnya direntangkan antara tahun 1973-2019. Dari aspek fungsional, fungsinya transparansi arsip-arsip atau buku yang dikeluarkan dinas pemerintahan Kabupaten Bogor adalah untuk memudahkan serta memberi informasi tersendiri kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

3. Interpretasi

Tahapan yang selanjutnya penulis lakukan dalam metode penelitian adalah, tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi, sering disebut dengan bias subjektivitas. Peneliti yang bersih biasanya membenamkan suatu sumber yang telah diperoleh, dan individu lain bisa melihat ulang data yang sama lalu menyimpulkan ulang. Maka dari itu, historiografi sejarah dalam subjektivitas diakui akan tetapi untuk dihindari. Interpretasi memiliki dua jenis, yaitu analisis serta sintesis. Analisis dalam interpretasi mengartikan uraian, dan sintesis mengartikan pada satuan.²⁵

Sebuah cerita bukan hanya kumpulan peristiwa, melainkan cerita berdasarkan peristiwa yang telah disusun menjadi satu kesatuan yang diinginkan. Demikian pula, penulisan sejarah

²⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 78-79.

juga mencakup sudut pandang penulis, pendekatan, metode, dan gaya, atau bahasa penulis. Namun, tidak seperti cerpenis, historiografi sejarah menekankan pembatasan untuk mengeluarkan isi atau data yang ada di otak peneliti tersebut; peneliti sejarah berpegang teguh melalui peristiwa serta menyajikan cerita seperti yang benar-benar terjadi²⁶.

Dalam penafsiran sejarah, untuk memperoleh suatu sintesis yang memuaskan, dibutuhkan suatu keadaan pandangan serta acuan mencakup dan menerima peristiwa yang memang bukan menjadi suatu kesatuan utuh, tetapi telah terorganisasi, berfungsi, dan berasosiasi sesuai dengan konsepnya. Sejarah bukanlah rangkaian peristiwa sederhana, tetapi interpretasi sejarah adalah susunan sebagai unit yang telah direncanakan²⁷.

Uraian sejarah bisa dipahami juga sebagai penafsiran sejarah. Penguraian ini bertujuan pada penggambaran. Di dalam metode interpretasi sejarah, peneliti sejarah diharuskan memahami faktor apa atau sebab apa peristiwa itu terjadi. Secara historis, sejumlah penyebab terkadang menyebabkan hasil dalam bentuk yang berbeda. Sementara suatu penyebab terkadang menyebabkan pandangan tertentu. Kemungkinan berbeda memiliki efek yang berbeda antara satu sama lain karena kondisi lingkungan yang berbeda²⁸.

Pada gaya kodifikasi penelitian, faktor visi peneliti sejarah memiliki andil konsekuensial, serta bukan gambaran liar. Gambaran liar atau imajinasi liar, mengartikan penelitian bukan berdasarkan angan-angan peneliti tersebut, penelitian harus didasarkan pada fakta serta peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Penelitian sejarah harus memiliki gambaran histori, imajinasi histori menyandarkan hukum serta logika pada dasar fakta sejarah yang benar terjadi. Walaupun, penelitian sejarah harus berdasarkan pada ketepatan dalam gambaran atau ilmu disiplin historis²⁹.

²⁶ Miftahudin, *Metodologi Sejarah Lokal*, hlm. 80.

²⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 18.

²⁸ Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 107.

²⁹ Ahmad Maksum, "Interpretasi Sejarah Sebagai Peristiwa Dan Masalah Pendidikan," *At-Turats* 9, no. 2 (2015): 3.

Disiplin yang dipergunakan dalam menyusun laporan, penulis menggunakan pada bidang ilmu sosial politik sebagai ilmu bantu. Dimana sejarah politik adalah sebuah sejarah politik gaya baru. Hal ini bertujuan untuk membuka dan menambah ilmu pengetahuan di bidang politik serta memperluas, berkelanjutan, dan multidimensi. Ada beberapa hal beserta kerangka konseptual, diantaranya adalah tipe elit, kategori, otoritas, kebudayaan politik, kepemimpinan, dan proses mobilisasi. Selanjutnya dalam sejarah politik memperhatikan hal seperti periodisasi berdasarkan waktu pada tahun penting dan periode pemerintahan³⁰.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Ashabiyah Ibn Khaldun. Secara etimologi ashabiyah berasal dari kata ashaba yang mengartikan mengikat. Secara fungsional ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang bisa mengukur kekuatan kelompok sosial tersebut³¹. Dalam sejarah peradaban Islam, teori ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban bersama. Tahap ini berlandaskan pada kerangka teoritis pada fungsi memberikan sebuah jawaban pada penelitian. Penelitian ini berhubungan pada bagaimana solidaritas masyarakat Islam di Indonesia bekerja sama dan menyuarakan suara melalui wadah organisasi, mengesampingkan juga pendapat pribadi demi berdirinya sebuah wadah organisasi yang adil dan sejahtera. Kemudian mendorong pada terciptanya keselarasan sosial serta menjadi penopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.

Dalam pembentukan Ashabiyah, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Semangat persatuan rakyat dibentuk dari faktor keagamaan. Hal ini didukung olehnya visi agama yang merendahkan visi dari perbedaan pandangan antar masyarakat³².

³⁰ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 165.

³¹ Khoirudin, "ANALISIS TEORI ASHABIYAH IBN KHALDUN SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN UMAT," *IAIN Raden Intan Lampung* (2000): 66–75.

³² Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,'" *Jurnal Politik Profetik* Volume 04, no. Politik (2016): 1–13.

4. Historiografi

Jika langkah heuristik, kritik, dan interpretasi sudah dilakukan, maka demikianlah langkah selanjutnya adalah tahap penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah suatu metode, tentang paparan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian sejarah yang sudah dituliskan wajib memberikan deskripsi yang jelas tentang proses penelitian tahap rencana hingga akhir³³.

Ketika menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk tulisan, tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas berupa, pengumpulan sumber, kritikan, interpretasi, dan metode akhir yaitu historiografi. Dalam historiografi yang berjudul “Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor 1973-2019”. Terdiri dari beberapa bagian awal yang akan penulis sajikan, yaitu halaman muka laporan, lembar persetujuan, moto hidup, kata pengantar, beserta daftar isi. Selanjutnya penulis akan menjelaskan urutan dari awal menuju akhir. Seperti;

BAB I pendahuluan, menjelaskan bagian mengenai tahapan penelitian dalam sejarah. Latar Belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan studi pustaka. Cara atau langkah peneliti, diawali dengan tahapan heuristik yaitu pengumpulan data atau sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, kritik, tahapan ini penulis memverifikasi apakah sumber yang didapat bisa dijadikan rujukan atau tidak. Penulis juga tidak lupa melakukan kritik melalui dua tahapan, yaitu eksteren dan interen. Tahapan selanjutnya adalah, interpretasi, yaitu penafsiran sejarah. Tahapan akhir, adalah historiografi.

BAB II menjelaskan tentang kondisi perpolitikan nasional serta sejarah terbentuknya PPP, dalam bab ini menjelaskan tentang pembentukan partai di Indonesia, politik Islam di Indonesia, sejarah berdirinya Partai Islam, dan sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan.

³³ Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 114.

BAB III menjelaskan tentang Ad / Art, tujuan serta usaha Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bogor, sejarah, program kerja, periode kepemimpinan dari tahun 1973, 1981, 1991, 2001, 2006, 2011, hingga 2021, perolehan suara pilbup tahun 2008, 2013, dan 2018, maupun perolehan suara legislatif pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

BAB IV penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian sejarah yang dilakukan penulis, kesimpulan akhir apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, saran serta kritik dari penulis, serta daftar pustaka yang memuat informasi.

